

OPTIMALISASI FUNGSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2016

Oleh : Fajri Akhmal Putra

Email : Akhmalputra@gmail.com

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus BinaWidya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5Simp. Baru Pekanbaru 288293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The background of this research is the formation of Kuansing FM radio as a medium of service and support the activities of local government, based on Kuantan Singingi Regent Regulation No. 7 of 2009 concerning Local Public Broadcasting Institution Kuansing FM. Kuansing FM Local Public Broadcasting Institution has been established since 2003 but in carrying out its function this radio has not been able to achieve the goal of the establishment of Kuansing FM radio. The non-optimal function of Kuansing FM radio is seen from several programs and activities of the 2016 Kuansing FM Local Public Broadcasting Institute which have not yet directly addressed the community such as the socialization program for public information disclosure, and rural broadcasts

This research directs how to optimize the function of FM Kuansing Local Public Broadcasting Institutions and the inhibiting factors that influence the non-optimal function of the Kuansing FM Local Public Broadcasting Institution. This study aims to describe the optimization of the functions of the Kuansing FM Local Public Broadcasting Institution and determine the inhibiting factors that influence the non-optimal functioning of the Local Public Broadcasting Institution Kuansing FM in 2016. This research is a qualitative approach research, this research was conducted in Kuantan Singingi District, the technique used to collect data in this study are interviews and documentation.

The results showed that the Kuansing FM Local Public Broadcasting Agency disseminated development information to the public through electronic media, in accordance with District Head Regulation number 7 of 2009, it was still unable to perform its functions optimally as an electronic media information provider in Kuantan Singingi Regency. The legal power of the Kuansing FM Local Public Broadcasting Institute is still weak and seems to be ignored, this is indicated by the absence of broadcasting permits. The inhibiting factors in the optimization of the function of the FM Kuansing Local Public Broadcasting Agency are the lack of broadcasting permits that must be possessed, the quality and quantity of HR owned, lack of training, and lack of facilities and infrastructure.

Keywords: *Optimization, Public Broadcasting Institutions*

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik disebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM berdiri dan mulai operasional sejak tahun 2003, dan mulai bergabung dengan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi pada tahun 2009.

Tujuan dibentuknya Kuansing FM adalah memberikan pelayanan penyiaran kepada masyarakat serta mendukung kegiatan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media elektronik. Berdasarkan peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM pasal 4 tentang tujuan pembentukan Kuansing FM adalah:

- a. Peningkatan arus informasi kepada masyarakat melalui media elektronik;
- b. Percepatan pencerdasan masyarakat;
- c. Percepatan informasi, publikasi terhadap berbagai rencana dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi.
- d. Sarana pengembangan seni dan budaya serta sarana hiburan bagi masyarakat.

Fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM adalah sebagai berikut:

1. Menyebarkan informasi pembangunan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Mencerdaskan masyarakat dengan menyajikan informasi tentang pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial budaya, seni, politik dan ekonomi melalui siaran bernuansa tradisional dan modern.
3. Menjadikan masyarakat yang religius dengan menyajikan informasi keagamaan.
4. Menyajikan hiburan musik dalam cita rasa yang bermutu.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyiarkan komunikasi bisnis produk lokal masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi sebagai potensi Kabupaten Kuantan Singingi.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM tidak rutin melakukan siaran setiap harinya, dikarenakan terkendala dari segi koneksi internet yang terhubung langsung secara nirkabel terhadap server radio, apabila status internet sedang *offline*, Radio Kuansing FM tidak bisa mengudara untuk menyiarkan siaran materi yang sudah dibuat. Lembaga Penyiaran Publik Kuansing FM akan melakukan siaran rutin pada saat event-event lokal saja, seperti event pacu jalur yang rutin setiap tahun dilaksanakan.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM berada dibawah Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi, pada tahun 2015 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran lembaga

penyiaran public jasa penyiaran radio dengan mengikuti prosedur yang seharusnya, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, pasal 14 menjelaskan persyaratan perizinan LPP, permohonan IPP dan LPP lokal harus melampirkan persyaratan meliputi :

- a. Surat permohonan.
- b. Kelengkapan administrasi
- c. Kelengkapan program siaran
- d. Kelengkapan data teknis

Aplikasi radio online yang berada di aplikasi store khusus android menjadi terobosan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM guna mempermudah akses untuk para pendengar, sebagai wujud penyebaran informasi yang sesuai dengan tujuan didirikannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM menjadi lebih mudah, kemudian program penyebarluasan informasi Haji yang langsung disiarkan oleh jamaah haji memberitahukan kondisi dan situasi para jamaah Haji yang berangkat dari Kontingen Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya. Adapula etos kerja yang tinggi dari pegawai, penyiar dan teknisi yang mampu membuat LPP Lokal Kuansing FM menjadi lebih baik dimasa yang akan datang, mampu bekerjasama dan bersinergi di dalam penyampaian informasi kepada pendengar, terutama dalam informasi pembangunan dan pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan kondisi yang ada di lapangan, adapun fenomena yang ditemukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM belum memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2002 pasal 33 ayat 1 yang menjelaskan bahwa sebelum menyelenggarakan kegiatannya, lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Perizinan belum didapatkan karena struktur organisasi di dalam Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi sering mengalami perubahan struktur.
2. Belum berjalannya semua fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuantan Singingi secara optimal dan efektif, dilihat dari tabel 1.1 program khusus di hari senin, rabu, dan jumat yaitu siaran pendidikan, siaran kesehatan, dan siaran pedesaan hanya berjalan 2 program siaran sedangkan siaran pedesaan tidak berjalan.
3. Masih adanya program dan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM tahun 2016 yang belum terealisasi, yaitu :
 - a. Pengadaan Mobiler dan peralatan media center
 - b. Sosialisasi keterbukaan informasi publik
 - c. Peningkatan bangunan RPD
 - d. Siaran Pedesaan
 - e. Pengadaan Tower Radio

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas penulis tertarik meneliti dengan judul “Optimalisasi Fungsi Lembaga Penyiaran Publik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016”

Rumusan Masalah

Melalui latar belakang pembahasannya, maka timbul beberapa permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan dalam penulisan ini, penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM di Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi belum optimalnya fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM ?

Kerangka Teori

a. Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi Pemerintahan menurut Erliana Hasan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara.

Menurut Robbins, Komunikasi memiliki 4 fungsi utama dalam suatu organisasi atau dalam kelompok tertentu, yaitu :

1. Fungsi pengawasan;
2. Fungsi motivasi;
3. Fungsi pengungkapan emosional;
4. Fungsi informasi;

Fungsi-fungsi komunikasi tersebut merupakan bagian integral dari fungsi organisasi dan apabila masuk pada bidang pemerintahan, fungsi tersebut ditambah dengan pemberdayaan (*empowerment*) oleh sebab itu perlu adanya kemampuan aplikatif dalam mengoperasionalkan urusan-urusan pemerintahan.

Menurut Claude E. Shannon menunjukkan komunikasi sebagai

system mekanistik yang berlangsung dalam lima elemen dasar, yaitu :

1. Sumber informasi (*Information source atau senders*)
2. Pemancar (*Transmitter*)
3. Saluran (*Channel*)
4. Pendengar (*Receiver*)
5. Tujuan (*Destination*)

Menurut Erliana Hasan fungsi komunikasi adalah untuk mencapai tujuan peran dominan dalam kehidupan manusia, yaitu antara lain :

1. Mencapai pengertian satu sama lain;
2. Membina kepercayaan;
3. Mengkoordinir tindakan;
4. Merencanakan strategi;
5. Melakukan pembagian pekerjaan;
6. Melakukan aktifitas kelompok; dan
7. Berbagi rasa.

Menurut Robbins, hal-hal mendasar dalam komunikasi yaitu :

1. Arah komunikasi

Komunikasi dapat mengalir secara *vertical* atau *lateral* (menyisi). Dimensi *vertical* dapat dibagi lebih lanjut menjadi kebawah dan keatas.

Kebawah ; Komunikasi yang mengalir dalam satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi kesuatu tingkat yang lebih bawah. Dibayangkan seperti manajer yang berkomunikasi dengan bawahannya.

Keatas ; Komunikasi keatas mengalir kesuatu tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi itu, yang digunakan untuk memberikan umpan balik kepada atasan, menginformasikan mengenai kemajuan pekerjaan kearah tujuan,

dan meneruskan masalah-masalah yang ada.

2. Jaringan komunikasi formal dan informal

Jaringan komunikasi menetapkan saluran-saluran tempat informasi mengalir. Jaringan ini mempunyai salah satu dari dua varietas, yaitu formal dan informal. Jaringan formal lazimnya *vertical*, yaitu mengikuti rantai wewenang dan terbatas pada komunikasi yang bertalian dengan tugas. Sebaliknya jaringan informal biasanya bergerak bebas kesegala arah, meloncati tingkat-tingkat wewenang dan kemungkinan besar memenuhi kebutuhan social anggota kelompok.

3. Proses komunikasi Media

Proses komunikasi media dikenal juga sebagai proses komunikasi sekunder, proses penyampaian pesan oleh seorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang (bahasa) sebagai media pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikasi sebagai sarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film dan banyak lagi merupakan media kedua yang sering digunakan dalam berkomunikasi.

Pada umumnya masyarakat beranggapan, media komunikasi itu adalah alat bantu dalam berkomunikasi. Jarang sekali orang menganggap bahasa sebagai media komunikasi. Hal ini disebabkan karena bahasa sebagai lambang (*symbol*) beserta isi (*content*) yaitu pikiran dan atau perasaan yang dibawa manusia menjadi inheren dalam totalitas pesan (*message*),

yang tampak tak dapat dipisahkan. Berbeda halnya dengan media, segera tampak apakah dalam bentuk surat, telepon, radio, televisi, internet dan lain-lainnya yang jelas tidak selalu menyatu dalam setiap aktivitas manusia. Tampaknya seolah-olah orang tidak mungkin berkomunikasi tanpa bahasa, tetapi orang mungkin dapat berkomunikasi tanpa surat, atau telepon, televisi, faxmille dan sebagainya.

Sebagaimana uraian terdahulu, pada umumnya memang bahasa yang paling banyak dipergunakan dalam berkomunikasi karena bahasa sebagai lambang mampu metransmisikan pikiran, ide, pendapat dan sebagainya, baik mengenai hal yang abstrak maupun yang kongkret; tidak saja tentang hal atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang, tetapi juga pada waktu yang lalu atau masa mendatang, oleh sebab itu kebanyakan media merupakan alat atau sarana yang diciptakan untuk meneruskan pesan komunikasi dengan bahasa. Seperti telah disinggung di atas, surat, atau telepon, atau, radio, televisi, internet, telepom misalnya, adalah media untuk menyambung atau menyebarkan pesan yang menggunakan bahasa.

b. Optimalisasi

Optimalisasi merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna sesuai dengan maksud, tujuan, dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut. Menurut Chulsum dan Novia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006:491), optimal merupakan sesuatu yang paling baik, sempurna, dan paling tinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan sesuatu agar sempurna, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan menurut Kamus Umum

Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta (1991:647), yang dimaksud dengan optimal adalah suatu kegiatan dengan tujuan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai tujuan. Usaha dalam suatu pekerjaan yaitu merupakan perbuatan daya upaya atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud.

Menurut Winardi (1999:363) optimalisasi adalah yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Pengertian optimalisasi hampir sama dengan efisiensi, akan tetapi terdapat perbedaan dari tujuan tersebut. Optimalisasi dapat berupa gabungan dari beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki dengan tujuan meningkatkan suatu hal yang hendak dicapai lebih baik dari sebelumnya. Optimalisasi dapat berupa gabungan dari beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki dengan tujuan meningkatkan suatu hal yang hendak dicapai lebih baik dari sebelumnya. Optimalisasi suatu cara yang dilakukan dimana mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam mencapai tujuan tertentu. Optimalisasi bisa dilakukan dengan meningkatkan kinerja yang baik sehingga pelayanan pun akan baik atau usaha untuk memecahkan segala persoalan yang ada untuk mencapai pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Optimalisasi sangat erat kaitannya dengan kinerja yang dilakukan oleh instansi dalam hal ini pemerintah sebagai wujud dari pelayanan yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang

optimal. Menurut Dwiyanto dalam Sembiring (2012:98) indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik adalah sebagai berikut :

1. Produktivitas

Produktivitas menekankan kepada seberapa besar pelayanan publik memberikan hasil yang diharapkan.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan menekankan kepada kepuasan masyarakat menjadi parameter kinerja dalam birokrasi.

3. Responsivitas

Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. Responsibilitas

Menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik eksplisit maupun implisit.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik konsisten dengan kehendak masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas optimalisasi dapat dicapai apabila pelayanan prima dijalankan. Suatu pelayanan dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal dan jika keduanya sudah mumpuni maka pelayanan prima pun akan dicapai. Faktor internal yang mempengaruhi pelayanan adalah berupa pelaksanaan sebuah layanan dengan standar layanan dasar yaitu sarana dan prasarana, sumber daya aparatur, dan legitimasi.

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sering didefinisikan sebagai alat yang digunakan secara langsung dan tidak langsung dalam suatu proses kegiatan. Sarana disini dimaksudkan adalah semua alat bantu yang digunakan oleh penyelenggara pelayanan untuk memudahkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan prasarana adalah semua alat bantu yang mendukung terlaksananya proses layanan.

2. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur adalah seseorang yang bekerja di instansi atau penyedia layanan.

3. Legitimasi

Menurut Jones dalam Sumaryadi (2010:78) mengemukakan bahwa terdapat dua bentuk legitimasi yang dapat didefinisikan pada suatu sistem politik. Bentuk pertama mengacu pada pengesahan, sedangkan yang kedua mengacu pada persetujuan.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pelayanan yaitu berupa partisipasi masyarakat. Yang mana menurut Sumaryadi (2010:46) partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Dari paparan di atas pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjadikannya optimal. Namun perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut mensukseskan suatu program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Perlu adanya kesadaran moral dan hukum oleh tiap anggota masyarakat. Pemerintah melakukan

sosialisasi terkait pelayanan publik namun hasil akhir ditentukan oleh partisipasi masyarakat.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Jhon SW. Creswell dalam Hamid Patilima mendefenisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Sedangkan jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Sumber data diperoleh secara langsung dari informan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan data lain untuk melengkapi dan mendukung penulisan terkait dengan isi Fungsi Lembaga Penyiaran Publik Kuantan Singingi Tahun 2016.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data dikumpulkan, dianalisis, dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian akan diolah dengan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang

menggambarkan secara rinci dan sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

HASIL PENELITIAN

A. Optimalisasi Fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM Kabupaten Kuantan Singingi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian sebelumnya, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik disebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM berdiri dan mulai operasional sejak tahun 2003, dan mulai bergabung dengan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi pada tahun 2009. Sampai saat ini Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM berada dibawah Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi.

Segmentasi target pendengar Radio Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Kuantan Singingi dan proyeksinya adalah untuk umum mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua, anak sekolah, mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga serta pekerja baik swasta maupun pemerintah. Komposisi siaran Radio Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten

Kuantan Singingi murni 100% adalah acara lokal.

Tujuan dibentuknya Kuansing FM adalah memberikan pelayanan penyiaran kepada masyarakat serta mendukung kegiatan pemerintah dalam menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media elektronik. Berdasarkan peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM pasal 4 tentang tujuan pembentukan Kuansing FM adalah:

- a. Peningkatan arus informasi kepada masyarakat melalui media elektronik;
- b. Percepatan pencerdasan masyarakat;
- c. Percepatan informasi, publikasi terhadap berbagai rencana dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi.
- d. Sarana pengembangan seni dan budaya serta sarana hiburan bagi masyarakat.

Fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM adalah sebagai berikut:

1. Menyebarkan informasi pembangunan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Mencerdaskan masyarakat dengan menyajikan informasi tentang pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial budaya, seni, politik dan ekonomi melalui siaran bernuansa tradisional dan modern.
3. Menjadikan masyarakat yang religius dengan menyajikan informasi keagamaan.
4. Menyajikan hiburan musik dalam cita rasa yang bermutu.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyiarkan komunikasi bisnis produk lokal masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi sebagai potensi Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Menyebarkan informasi pembangunan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Menyebarkan informasi yang berkembang terhadap suatu pembangunan di daerah melalui media secara luas dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Tentunya media informasi dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing daerah. Penyebaran informasi pembangunan pemerintah kabupaten Kuantan Singingi tentunya sesuai dengan visi misi dari kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang unggul, sejahtera dan agamis di provinsi Riau tahun 2021”

Misi :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima;
- b. Meningkatkan sumberdaya manusia kabupaten Kuantan Singingi yang sehat, cerdas, dan produktif;
- c. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup

masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata;

- d. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
- e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
- f. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya

2. Mencerdaskan masyarakat dengan menyajikan informasi tentang pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial budaya, seni, politik dan ekonomi melalui siaran benuansa tradisional dan modern.

Media informasi sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai misi ikut mencerdaskan masyarakat. Dalam kehidupan sosial, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup mereka, untuk itu media informasi dituntut untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat. Fungsi media informasi yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial budaya, seni, politik dan ekonomi tentunya harus dapat menunjang peningkatan kehidupan spiritual masyarakat akan informasi-informasi yang objektif dan dapat dipercaya.

3. Menjadikan masyarakat yang religius dengan menyajikan informasi keagamaan.

Radio mampu menyiarkan informasi yang amat memuaskan walau hanya dilengkapi dengan unsur audio, radio dalam melayani informasi atau siarannya bersifat audial, di mana dalam

menyampaikan pesannya dengan cara mendengarkan. Ini berarti radio dalam melaksanakan fungsinya telah menjalankan fungsi sebagai media penerangan, fungsi memberi pengaruh yaitu fungsi mempengaruhi kepada khalayak di mana sang komunikator memegang peran penting untuk merubah kehidupan masyarakat. Dengan demikian sang komunikator memiliki atau membawa misi tertentu dalam komunikasinya yaitu untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat. Radio bersifat sangat praktis baik dari sisi penyajian dan penerimaan, sehingga pendengar lebih mudah terlibat untuk membuat radio menjadi personal sekaligus komunal, radio juga menjadi sarana bagi para pendengar untuk menyuarakan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, bahkan interaksi langsung dapat terjadi dengan pendengar.

4. Menyajikan hiburan musik dalam cita rasa yang bermutu.

Radio sebagai media massa yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang beraneka ragam dalam setiap ruang, tempat, dan waktu, masyarakat akan lebih mudah mengakses siaran radio yang tidak harus tetap berada di depan radio. Dalam kondisi seperti ini memberikan pemahaman bahwa mendengar radio sembari mengerjakan sesuatu pekerjaan lainnya, ini berarti sambil mendengarkan radio masih memiliki peluang waktu yang banyak untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan secara maksimal, radio merupakan media massa elektronik termurah dibandingkan dengan media masa lainnya. Radio memberikan pencerahan atau hiburan pada masyarakat yang sedang mengalami berbagai problem dalam kehidupannya.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyiarkan komunikasi bisnis produk lokal masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi sebagai potensi Kabupaten Kuantan Singingi.

Produk lokal adalah produk yang dihasilkan dari dalam negeri atau daerah itu sendiri, produk lokal merupakan hasil tenaga, atau bahan produk yang digunakan daerah lokal, dan menggunakan label lokal. Adapun produk lokal yang menonjol di Kabupaten Kuantan Singingi berupa makanan meliputi kerupuk sagu, wajik takiak, wajik lopur, madu lebah, kare-kare, dodol tapai, dodol rosella, dan gelamai, produk lokal berupa kerajinan meliputi kerajinan bambu, kerajinan kayu, kerajinan miniatur perahu jalur, kerajinan tenun, kerajinan peci, dan kerajinan batik. Namun dalam penyebaran informasi yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM belum optimal, hal ini dilihat dari belum adanya kebijakan atau inisiatif dari Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi dan mengundang UKM yang menyampaikan produk lokal agar dapat dipasarkan melalui media masa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM, hal ini dikarenakan pihak Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM belum memiliki izin untuk menyiarkan iklan, seharusnya iklan dapat dijadikan pendapatan retribusi bagi pendapatan daerah.

Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM

Beberapa hal yang menjadi faktor belum optimalnya fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM antara lain :

1. Minimnya jumlah penyiar yang dimiliki

Tingkat Pendidikan sangat mempengaruhi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di instansi maupun dinas terkait karena tingkat pendidikan bisa memperlancar kerja yang diberikan dan dengan cepat dimengerti oleh pegawai yang bersangkutan. Dalam Lembaga Penyiaran Publik Lokal terdapat 16 orang yang menjalankan tupoksinya namun dalam melakukan fungsinya sebagai pemberi informasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal pada tahun 2016 memiliki 2 penyiar untuk melakukan penyiaran, dikarenakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal mengandalkan tenaga Honorer yang bekerja di Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, sedangkan pada tahun 2016 tenaga honorer di Kabupaten Kuantan Singingi telah dirumahkan, sehingga tersisa 2 penyiar yang berasal dari golongan PNS.

2. Belum adanya izin penyelenggaraan penyiaran

Dalam rangka melakukan fungsi penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM belum mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dari tahun dibentuk hingga tahun 2016, pengurusan perizinan penyiaran baru dilakukan 2 kali pada tahun 2012 hanya sampai pada tahap pengumpulan berkas permohonan perizinan ke KPID Kabupaten Kuantan Singingi, dan tahun 2016 dilakukan kembali untuk mendapatkan perizinan penyiaran.

3. Tidak adanya pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi

Dalam meningkatkan kualitas penyiaran maka diperlukan pelatihan untuk para pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM agar dapat mengoptimalkan kinerja dan program dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM, tidak adanya pelatihan bagi para pengelola membuat kurang optimalnya kinerja dan kurang optimalnya program yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi kurang mengikutsertakan para pengelola radio Kuansing FM dalam pelatihan-pelatihan seperti pelatihan manajemen program/siaran dan penyiar radio, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi hanya memberikan dan mengirimkan para pengelola radio dalam melakukan kunjungan ke Lembaga Penyiaran Publik Lokal daerah lain.

4. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM

Seiring dengan tuntutan terciptanya sistem pemerintahan yang baik tersebut maka birokrasi pemerintah saat ini dihadapkan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga pencerdasan masyarakat akan dituju dapat terealisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan. Lembaga Penyiaran Publik Kuansing FM dalam menjalankan fungsinya tersebut masih dihadapkan

dengan permasalahan minimnya sarana dan prasarana untuk mencapai tujuannya yaitu masih minimnya daerah jangkauan pemancar Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM untuk mencakup seluruh daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan juga masih kurang memadainya tempat studio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM dalam melakukan siaran. Sarana dan prasarana Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM terlihat dari jumlah yang tersedia dalam mendukung penyelenggaraan penyiaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan diketahui bahwa tujuan dibentuknya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM adalah memberikan pelayanan penyiaran kepada masyarakat serta mendukung kegiatan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media elektronik, sesuai dengan peraturan bupati nomor 7 tahun 2009 mengenai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM. Terkait dengan ini pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pemberi informasi media elektronik di Kabupaten Kuantan Singingi, kekuatan hukum yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM juga masih lemah dan terkesan masih diabaikan, hal ini ditandai dengan tidak adanya perizinan penyiaran yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM yang seharusnya dimiliki oleh setiap Lembaga Penyiaran sebelum melaksanakan tugas

dan fungsinya sebagai pemberi informasi media elektronik.

Kemudian di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM dapat disimpulkan bahwa pada fungsinya masih belum berjalan dengan optimal sesuai dengan yang telah dibuat, sehingga tujuan dari pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM belum tercapai. Dari hasil penelitian juga diketahui adapun faktor-faktor penghambat dalam optimalisasi fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM adalah belum adanya perizinan penyiaran yang harus dimiliki, sumber daya yang minim dari segi SDM, minimnya pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM hal ini berpengaruh dari segi kualitas penyiaran yang dilakukan, minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi hendaknya lebih memperhatikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM sebagai media informasi elektronik dalam mendapatkan legalitas hukum serta perizinan-perizinan yang diperlukan sehingga tujuan dibentuknya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM bisa tercapai sepenuhnya.
2. Kepada Kepala Studio Kuansing FM hendaknya mengupayakan pengajuan peningkatan sumber daya di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran

Publik Kuansing FM baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, mengingat hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu Lembaga Penyiaran sebagai media pemberi informasi kepada seluruh masyarakat.

3. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi hendaknya memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM terutama pemberian pelatihan dan pembinaan kepada penyiar, sehingga dalam fungsi penyiaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pelayanan pemberi informasi media elektronik.

4. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan mampu membuat Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM dalam mendapatkan legalitas sebagai lembaga penyiaran.

5. pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien.

6. Kepada masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor roda dua dan empat selaku kelompok sasaran kebijakan hendaknya untuk lebih peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan uji emisi demi tercapainya kebijakan yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Erliana Hasan, 2005, *Komunikasi Pemerintahan*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Hamid Patilima, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006).

Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ciawi-Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

Rasyid, Muhammad Ryaas, 2002, *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT.Mutiara Sumber Widya.

Sukardi, 2012, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi

Aksara.

Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan (Dari perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sembiring, Masana. 2012, *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokus Media

Winardi, 1999, *Pengantar Manajemen Penjualan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

PeraturanPerundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuansing FM.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan

penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Skripsi dan Jurnal :

Lufia Alaina, Universitas Riau, Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau Dalam Penyelenggaraan TV Kabel Di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016.

Venty Andistya Mellawati, Universitas Gadjah Mada, Kebijakan Siaran Program Difabel dan Implementasinya di Lembaga Penyiaran Publik (Studi Kasus Kebijakan Siaran Program Difabel dan Implementasinya dalam Program “Kami Bisa Tanda Petik di TVRI Stasiun D.I. Yogyakarta”).

Novitasari Efiana Rose, Universitas Gadjah Mada, Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio RI Di Yogyakarta.

Yantos. 2015. Peranan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Dalam Mendukung Pemerintah Daerah. Riau: Jurnal RISALAH. Vol. 26, No. 2:94-103.

Rochmad Effendy. 2014. Mengurai Potensi Ruang Publik Lembaga Penyiaran Publik Dalam Upaya Demokratisasi Masyarakat Lokal. Universitas Merdeka Malang: Jurnal REFORMASI. Vol. 4, No. 2:2407-6864.